

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kota Bukittinggi merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia, diantaranya adalah Mohammad Hatta dan Assaat yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat presiden Republik Indonesia dimasanya. Selain sebagai kota perjuangan, Bukittinggi juga terkenal sebagai Kota wisata beriklim sejuk. Tempat wisata yang ramai dikunjungi adalah Jam Gadang, yaitu sebuah menara jam yang terletak di jantung kota sekaligus menjadi simbol Kota yang berada di tepi Ngarai Sianok.

Perkembangan Kota Bukittinggi pada pariwisata dan perdagangan, kurang disertai dengan kehidupan penduduk yang baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2015, mencatat adanya pendapatan rendah penduduk dari persentase kemiskinan penduduk Kota Bukittinggi, yaitu tahun 2007 sampai tahun 2014 dengan rincian berikut: tahun 2007 (5,23%) 2008 (7,2%) 2009 (6,19%) 2010 (6,82%) 2011 (6,49%) 2012 (5,73%) 2013 (5,36%) dan 2014 (4,96%). Dari data di atas, memang adanya penurunan penduduk miskin, tapi tidak adanya perubahan yang berarti dari setiap tahun.

Penduduk miskin di Kota adalah kelompok marginal, yang sering mengalami tekanan ekonomi dan terpaksa menanggung efek domino yang tak pernah usai menghimpit mereka. Kondisi sosial rumah tangga miskin di perkotaan cenderung rapuh, rentan dan terperangkap hutang. Pemenuhan kebutuhan hidup di

Kota sering terancam, terpuruk karena pengeluaran biaya pemenuhan kebutuhan sering tidak seimbang dengan pemasukan atau *income* yang diterima demi menjaga kebutuhan tetap aman dan terkendali. Tanpa didukung modal yang cukup, serta warga dan pemerintah kurang terkonsentrasi pada perbaikan kehidupan penduduk miskin di Kota. Hal ini karena semua warga sibuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kondisi ini berbeda dengan masyarakat di pedesaan, yang masih terikat kerjasama dan kepedulian kuat antara sesama, (Suyanto, 2013: 217).

Melihat Bukittinggi sebagai salah satu Kota sedang berkembang dengan wisata, juga berkembang dengan ciri khas makanan ringan, seperti: keripik sanjai. Keripik sanjai terbuat dari ubi kayu dan ubi rambat. Ubi lebih umum disebut masyarakat terutama masyarakat Kampung Sanjai Dalam dengan *belo*. Daerah ini merupakan salah satu daerah penyangga ekonomi Kota Bukittinggi. Produksi keripik sanjai dalam satu *tungku belo* mencapai 400 kg, untuk 1x produksi. *Tungku belo* sebutan umum untuk tempat pengolahan *belo* menjadi keripik sanjai. *Tungku-tungku* yang memproduksi disini sudah semenjak lama, namun perkembangan ekonomi pekerja disini juga tidak membaik, maka inilah salah satu alasan penelitian ini menjelaskan tentang upaya pekerja *belo* bertahan hidup.

Ubi digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan keripik sanjai. Proses pengolahan *belo* menjadi keripik, terdiri dari beberapa tahap seperti: pengupasan, pemotongan, penggorengan dan pemberian rasa. Tahap ini menjadi proses utama pembuatan keripik sanjai dalam menentukan mutu dan jumlah yang dihasilkan. Pekerja *belo* memperoleh pendapatan hanya cukup untuk kebutuhan

harian, kisaran pendapatan yang diterima hanya Rp 60.000,- . Hasil ini tidak memberikan perubahan berarti, bagi perkembangan ekonomi rumah tangga pekerja.

Permasalahan yang justru dihadapi Kampung Sanjai Dalam di Kelurahan Manggis Ganting adalah meningkatnya penduduk miskin. Adanya penduduk miskin, sebagai tanda makin lemahnya pendapatan penduduk. Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi 2016 mencatat dari tahun 2011 sampai tahun 2015 menunjukkan Rumah Tangga Sasaran Program Perlindungan sosial (RTS PPLS 2011). Angka kemiskinan penduduk Manggis Ganting mencapai 221. Tahun 2015 yang bertransformasi nama menjadi Pemutakhiran Basis Data Terpadu atau PBDT 2015, angka RTS penduduk Manggis Ganting mencapai 270. Tidak hanya kelurahan Manggis Ganting, sebagai kelurahan dari Kampung Sanjai Dalam, penelitian ini juga melihat RTS 2011—2015 kelurahan lain dalam kecamatan Mandiangin Koto Selayan, untuk mempertegas keabsahan penelitian ini. Berikut gambarannya dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS), 2011-2015

Kecamatan/Kelurahan	RTS PPLS 2011	RTS PBDT 2015
Mandiangin Koto Selayan	2067	2735
Campago Guguk Bulek	240	349
Campago Ipuh	472	593
Garegeh	75	107
Koto Selayan	83	104
Kubu Gulai Bancah	150	255
Manggis Ganting	221	270
Puhun Pintu Kabun	230	323
Puhun Tembok	355	452
Pulai Anak Air	241	282

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat kemiskinan di Kota Bukittinggi dari tahun 2011 dan 2015 tidak adanya penurunan, tapi meningkat. Hal ini sebagai bukti kemiskinan memang menjadi permasalahan bersama dan harus diselesaikan secepatnya, supaya masyarakat mendapat kesejahteraan hidup yang benar-benar dapat dinikmati bersama.

Penduduk Kelurahan Manggis Ganting mayoritas bermata pencaharian sebagai pekerja. Diantara pekerja tersebut ada yang bekerja sebagai pekerja *belo*. Selain sebagai pekerja *belo* mereka juga mencoba pekerjaan lain, demi mencukupi kebutuhan hidup, yaitu dengan berdagang makanan ringan, menyewakan rumah peninggalan dari orang tua. Mereka mencoba ke luar dari sekedar jadi pekerja *belo*, namun mereka sering gagal karena ketiadaan modal. Pada akhirnya, memutuskan tetap bertahan sebagai pekerja *belo*.

Dalam bekerja mereka mendapatkan imbalan dalam bentuk “uang” dari pemilik usaha keripik sanjai. Hal ini adalah pengganti tenaga yang dikeluarkan, (Jhonson, 1986: 155). Pekerja di *tungku belo* mencapai tujuh orang. Umumnya pekerja di usaha ini berjenis kelamin perempuan. Pekerja *belo* akan bekerja tergantung dari datangnya *belo* misal, jika *belo* datang pagi jam 07.00 Wib, maka mereka akan bekerja hingga jam 16.00 Wib.

Pekerja *belo* disediakan makan siang oleh pemilik usaha keripik sanjai. Hal ini dilakukan untuk menjaga kapasitas tenaga mereka tetap dalam kondisi baik. Sementara, cara kerja dilakukan sudah terspesialisasi dengan bidang kerja masing-masing misal, pekerja sebagai pemotong *belo* hanya sebagai pemotong. Tujuannya untuk menjaga mutu dan jumlah keripik yang dihasilkan. Di *tungku*

belo terbentuk hubungan yang lebih fokus pada moral “*security of life*” alias keamanan hidup dalam mengarahkan perilaku ekonomi, sosial, dan budaya. Menjadi pekerja *belo* berfungsi mengamankan kebutuhan hidup, atau dengan alasan mendahulukan kebutuhan yang memang dirasa perlu. Misal, kebutuhan untuk “pengamanan dari rasa lapar”. Prinsip yang diterapkan ini terikat pada nilai dan norma. Nilai dan norma dikonstruksi secara sosial di setiap pekerja. Pekerja *belo* disini bekerja dalam bentuk borongan, (Jones, 2010: 82—83).

Kemudian penelitian ini melihat moral ekonomi pekerja *belo* dalam upaya bertahan hidup menjadi penting, bahwa selama ini telah diteliti oleh beberapa ahli petani seperti: Scott (1976), Hayami dan Kikuchi (1981), Koentjaraningrat (1979) dan Marzali (2003) terkait kajian mereka mengenai moral dan upaya bertahan hidup, pada petani di pedesaan Jawa. Penjelasan mengenai petani hampir bersamaan dengan pekerja *belo*, keduanya bekerja pada taraf pendapatan yang tidak menentu. Penelitian ini berpijak pada pemahaman Scott, mengenai moral ekonomi. Dalam “*The Moral Ekonomi of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*”, Scott (1976). Mendefinisikan moral ekonomi petani pada keadilan ekonomi, dan eksploitasi mereka tentang pungutan-pungutan pada hasil produksi, yang mana dapat ditolerir dan mana yang tidak.

Moral adalah tindakan atau tingkahlaku yang tidak berlawanan dengan aturan dan cenderung baik. Tingkahlaku dalam berinteraksi setiap orang disebut dengan moral. Moral mengandung ketetapan baku, yaitu tidak melanggar norma - norma di masyarakat. Orang tidak baik sering disebut masyarakat orang yang tidak atau kurang bermoral. Sedangkan, moral ekonomi merupakan analisis

terhadap sesuatu yang membuat orang berperilaku, bertindak dan beraktifitas dalam kegiatan ekonomi, (Scott, 1994: 5—6). Moral ekonomi juga sebagai keseluruhan aktifitas kegiatan ekonomi dan moral menjadi dasar kegiatan ekonomi tersebut.

Penjelasan awal mengenai moral di angkat oleh Smith, mengenai kesejahteraan rakyat di dalam Negara. Setelah itu ssejarawan dari Inggris, E.P.Thompson, menggunakan konsep moral ini dalam karyanya, *The Moral Economy of the Factory System* (1835), dia melihat kepercayaan mengenai agama berada dalam ranah ekonomi, akibatnya ekonomi berada pada landasan moral, yang terkait kuat keadilan dan kemiskinan, (Burke, 2003: 105—106). Berkaitan dengan keadilan, kutipan berikut berkaitan dengan prinsip moral yaitu:

Selain berkonsentrasi pada persoalan dinamika logika pemikiran ekonomi, kita akan memberi perhatian pada masalah moral ekonomi, argumen di balik pemikiran ini adalah bahwa masalah ekonomi pada akhirnya bersentuhan dengan masalah fundamental, seperti kesejahteraan bersama atau kebaikan bersama dan keadilan (Dua, 2008: 13).

Moral ekonomi lebih jelas sebagai tindakan ekonomi (*economic behavior*), yaitu perilaku yang diatur oleh nilai-nilai budaya. Oleh sebab itu, perlu dilihat sebagai tindakan sosial (*social action*) dalam menghadapi sumber daya, (Kleden, 2004: 180). Penjelasan lebih lanjut menempatkan moral ekonomi tentang bagaimana etika bertahan hidup dalam situasi minimal di pedesaan ataupun di perkotaan, bahkan pembangkangan muncul jika adanya inovasi dari penguasa. Pembangkangan dan pemberontakan adalah sebagai upaya petani memahami konsisi ekonomi, yaitu keadilan yang diperoleh disaat berada dalam batas hidup minimal. Inilah yang disebut dengan ekonomi moral.

Ekonomi moral meletakkan desa dan patron-klien sebagai dua konsep penting dalam melangsungkan kesejahteraan komunitas. Cara ini dinilai menjadi jalur dalam mengamankan hidup antara patron (petani pemilik), pada klien (petani miskin) yang tidak memiliki sumber daya, (Scott, 1994: 42—49). Konsep moralitas berada dalam hubungan ekonomi timbal balik, juga bertukar dalam memperoleh manfaat setiap keduanya. Definisi ini semakin mengukuhkan posisi Scott sebagai bagian dari aliran ekonomi moral. Dalam karyanya yang lain juga menjelaskan, sitem ekonomi terbangun atas dasar ekonomi kolektif dan menjaga kebutuhan dasar ekonomi lemah.

Sementara, berfokus pada Moral ekonomi yang sesuai penelitian ini terangkum pada pranata sosial, berkembang dari kebiasaan bersama, hingga kebiasaan normatif yang di kuatkan dengan aturan-aturan, termasuk penghargaan dan sanksi diperlihara oleh hukum yang ada di masyarakat. Perilaku masyarakat dalam skala yang lebih mikro dibimbing oleh moral dan menjadi aturan main dalam sistem-sistem sosial di masyarakat. Konsep moral ekonomi pekerja *belo* dalam penelitian ini merupakan bagian dari upaya bertahan hidup dalam kondisi minimal, mengatur interaksi sosial dan ekonomi antara pekerja, pemilik dan masyarakat.

Moral ekonomi dianggap penting dalam sistem penghidupan pekerja *belo*, bahwa mereka menjalankan hidup dengan prinsip “*Security of Life*” alias keamanan hidup. Prinsip kewanaman hidup, akan mampu melatar belakangi pengaturan teknis, sosial dan moral masyarakat pekerja *belo*. Tidak hanya masyarakat desa yang memiliki suatu prinsip dalam dahulukan selamat seperti

yang disampaikan Scott, tapi dalam masyarakat Kota, seperti Bukittinggi juga menganut suatu prinsip keamanan dalam menjalankan hidup, supaya tetap bisa eksis di masyarakat.

Moral ekonomi disini dipahami sebagai jalinan ikatan vertikal antara dua pihak yang berbeda, dalam penguasaan sumber daya. Hubungan tersebut ada arus pertukaran timbal balik, namun tidak menjamin satu pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dengan pihak lain. Adakalanya yang terjadi justru eksploitasi satu pihak yang menguasai sumber daya lebih banyak, terhadap pihak yang tidak memiliki atau sedikit sumber daya. Secara teoritis, prinsip keamanan hidup menjadi dasar pembentukan moral pekerja *belo*, supaya tetap berdaya dalam hidup.

Scott mendudukan moral ekonomi berfungsi sebagai jaminan sosial masyarakat, yang disebutnya sebagai asuransi sosial. Dimainkannya nilai-nilai ekonomi moral sebagai dasar relasi ekonomi, dengan cara berharap bantuan dari tetangga dan masyarakat lain. Situasi ini dianggap sangat ampuh untuk memberikan jaminan keamanan hidup masyarakat pada tahap hidup minimal.

Pendapat senada juga dikemukakan Khan (2001), bahwa dalam sistem produksi agraria cenderung subsisten, terutama diwilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Hubungan moralitas yang tertata baik akan menentukan pencapaian sosial, terutama dalam produksi dan distribusi. Selanjutnya Lyon (2002) menyatakan, bahwa moralitas memang umumnya berada pada masyarakat berkembang. Gambaran ini sebagai hubungan pribadi yang berwujud jaringan

sosial, antara dua pihak atau lebih. Hubungan ini biasanya terbina karena sukarela dan didasari kekeluargaan serta terbina secara sosial.

Scott (1994) melihat hubungan dengan ekonomi memiliki aturan main tersendiri. Patron-Klien disebut sebagai hubungan pertukaran antar peran, di mana satu pihak memiliki status sosial ekonomi lebih tinggi (patron), atau lebih umum disebut sikaya. Memiliki pengaruh dan sumber daya sendiri, untuk memberikan perlindungan atau manfaat, atau keduanya, untuk pihak yang memiliki status lebih rendah (klien), yang juga umum disebut dengan simiskin.

Hubungan Patron-Klien dalam ekonomi moral, lebih jelas dilihat sebagai hubungan yang bersifat saling menguntungkan, atau dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Patron berkewajiban menjaga hidup Klien, supaya selalu aman dan sejahtera dari ancaman kemiskinan. Klien berkewajiban memberikan perhatian dan kesetiaan pada Patron, layaknya anak kepada Ayah. Ikatan Patron-Klien didukung desa sebagai penyedia pemenuhan kebutuhan hidup, patron-klien menjadi instrumen distribusi sikaya kepada si miskin, dalam mencapai kesejahteraan praktek-praktek ekonomi dan pertukaran sosial.

Kesetiaan Klien kepada Patron, karena keinginan tetap terjamin dalam penyelenggaraan ekonomi rumah tangga. Jika Klien berada pada krisis kebutuhan dasar, akibat menurunnya produksi panen, membuat petani miskin menjual atau menggadai apapun yang dimiliki, atau bahkan menjual harta satu-satunya, seperti sepetak sawah demi tetap melanjutkan hidup. Inilah yang disebut “dahulukan selamat” yang dimaksud Scott, sembari menunggu produksi panen meningkat. Meningkatnya panen berarti juga penyambungan hidup untuk petani miskin,

karena mampu bekerja di sawah-sawah pemilik untuk memperoleh pendapatan, (Scott, 1994: 23—49).

Ekonomi moral telah meletakkan argumentasi, bahwa para petani akan mengambil resiko ketika mengevaluasi strategi ekonomi. Mereka akan melakukan usaha-usaha kecil yang memberikan hasil pasti, dari pada hasil banyak tapi mendatangkan resiko berlipat ganda. Penjelasan mengenai petani di atas bersamaan dengan masalah yang dihadapi pekerja *belo* dalam bertahan hidup di Kampung Sanjai Dalam Kota Bukittinggi.

Masalah sentral yang dihadapi pekerja *belo* adalah sifat mata pencaharian yang lekat dengan resiko dan ketidak pastian, antara lain: 1) Dalam bekerja di *tungku-tungku belo* sangat tergantung dengan produksi *belo*, yang tidak bisa dipastikan, karena terikat pada permintaan pasar. 2) Pekerja *belo* tidak didukung dengan lahan pertanian, untuk ketersediaan bahan pokok kebutuhan rumah tangga, seperti: beras. 3) Penguasaan teknologi pengolahan *belo* sulit diketahui pekerja. 4) Pekerja *belo* menghadapi masalah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, untuk berwirausaha sendiri. 5) Modal pekerja *belo* yang terbatas, dan habis untuk pemenuhan kebutuhan setiap hari. Dengan segala resiko krisis dan ketidak pastian tersebut, seringkali pekerja *belo* dikategorikan sebagai kelompok masyarakat miskin dari kelompok paling miskin (*poor of the poorest*).

Semua permasalahan yang dihadapi dalam sistem penghidupan pekerja *belo*, mengharuskan mereka mengkonstruksi mekanisme penjaminan penghidupan, melalui transformasi ekonomi. dengan cara, mencari alternatif pekerjaan lain, seperti: berdagang dan menyewakan rumah, demi tetap

memperoleh pendapatan, supaya tetap hidup. Kondisi ini dianggap dapat mempertahankan penghidupan mereka, pada kondisi keberlangsungan dan aman dalam hidup.

Penelitian ini berawal dari dugaan, bahwa keberadaan moral ekonomi mampu mengamankan dan menyelamatkan pekerja *belo*, dari beragam bentuk resiko krisis dan ketidakpastian. Sistem ekonomi pekerja *belo* dengan segala permasalahannya tetap memiliki daya bertahan, hingga saat ini. Daya bertahan tersebut pada dasarnya berakar dari aspek nilai dan budaya, termasuk hubungan kerjasama dan saling memiliki setiap pekerja *belo*. Bekerjanya moral ekonomi, akan mengkaitkan dengan tindakan pemenuhan kebutuhan pekerja *belo*, khususnya tindakan ekonomi dalam rangka bertahan hidup dari krisis pendapatan.

Dalam mendefinisikan moral ekonomi, Scott memperhatikan subsistensi (kebutuhan dasar). Hal ini dilihat Scott pada prinsip “*savety first*” (dahulukan selamat), yang banyak melatar belakangi pengaturan teknis, sosial dan moral. Orang yang lebih mewah dianjurkan untuk membantu dan menolong kerabat sedang dalam kesukaran. Ini menjadi dasar dari pemikiran Scott dan orang berperilaku, bertindak, terhadap kegiatan ekonominya, juga menghubungkan dengan aktifitas sosial, ataupun budaya yang disalurkan pada keterikatan kerja manusia.

Perdebatan mengenai moral ekonomi juga diteliti pakar sosial lainnya, seperti yang diteliti oleh Barington Moore Jr dan Erik R. Wolf dalam Scott (1994). Pakar ini menerangkan, petani akan marah jika pemilik modal melakukan eksploitasi pada mereka. Pemberontakan petani dapat terjadi karena banyak faktor.

Faktor terjadinya pemberontakan tersebut adalah persekutuan petani dengan kelas lain, serta keberadaan organisasi kaum petani.

Pembahasan lebih luas tentang petani dalam bertahan hidup, tidak dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada kajian moral ekonomi pekerja *belo* dalam upaya bertahan hidup. Berbagai upaya telah dilakukan pekerja dalam bertahan hidup, salah satunya dengan menghemat pendapatan dan hanya digunakan untuk kebutuhan dasar rumah tangga. Berdasarkan data monografi Kelurahan Manggis Ganting 2015, bahwa penduduk Kampung Sanjai Dalam berpendapatan rendah berada pada angka 118 kepala keluarga. Rata-rata pekerja *belo* sudah bekerja lebih dari lima tahun. Apa yang mendasari mereka bertahan sebagai pekerja *belo*? karena itu, penting untuk melihat moral ekonomi pekerja *belo*, dalam upaya bertahan hidup. Perbedaan pekerja *belo* dengan petani Jawa adalah pada keadaan geografis, ketersediaan sumber daya alam, ataupun budaya. Seperti penelitian dari Imam Fauzi (2014) yang menjelaskan bertahan hidup tentang potensi dan sumberdaya.

“Keamanan hidup” menjadi dasar terpenuhi kebutuhan hidup paling minimal. Prinsip ini tidak lahir dengan sendirinya, melainkan dibentuk oleh kondisi kehidupan, lingkungan alam dan sosial-budaya. Semua ini menempatkan orang pada garis batas antara hidup dan mati, makan atau kelaparan.

Keterikatan hidup yang sama dalam kelemahan pendapatan dan membagi setiap pekerjaan, membuat mereka rela sama-sama mendapat sedikit penghasilan, asalkan dapat sama-sama bekerja. Semua itu disebut Scott dengan berbagi kemiskinan (*Shared Poverty*). Bertahan pada kebutuhan hidup paling minimal

dengan cara meminjam uang pada saudara, melakukan gadai terhadap harta yang dimiliki, bahkan menjual harta satu-satunya yang dimiliki.

Pekerja *belo* mulai dipengaruhi oleh perkembangan pertanian yang semakin modern. Sistem pertanian yang dulunya harmonis, sekarang berubah menjadi sistem pertanian komersil, membuat pekerja *belo* kehilangan lahan pertanian dalam mendukung perkembangan pendapatan. Misal, dahulu pekerja ke sawah untuk mendapatkan hasil panen, sekedar pemenuhan kebutuhan. Sekarang hasil panen sulit didapat karena menjadi barang komersil dan diperjualbelikan di pasar, serta ketentuan harga dikuasai pasar. Inilah penyebab Desa sudah berpindah ke Kota dan penduduk cenderung menerima begitu saja nasib, pesimis, tidak berdaya dan enggan berisiko, bahkan pada titik terendah mereka akan menjual apapun untuk memperhankan hidup (Suyanto, 2013: 212).

Kesulitan hidup demikian besar dirasakan pekerja *belo* karena ketiadaan tanah, ditambah lagi untuk mencukupi kebutuhan harian semakin sulit seperti: beras, lauk-pauk, dan sayuran. Bahan pokok ini dulunya mudah diperoleh, sekarang mendapatkannya harus mengalami perjuangan, bahkan pengorbanan tenaga. Pilihan menerima atau menolak peranakan sebagai pengamanan hidup pekerja, disebut dengan moral ekonomi dalam upaya bertahan hidup, (Alfian, G.Tan dan Soemardjan, 1980:120).

Pemilikan sumber-sumber pencapaian kekayaan memperlihatkan perbedaan dasar antara pemilik modal dengan pekerja, sekaligus untuk mempertahankan usaha. Kalau tidak, usaha yang dijalankan bisa saja mengalami kehancuran, (Ritzer dan Goodman, 2003: 172—173). Semua itu berkaitan dengan

pembangunan hukum di Indonesia. Bila ditelusuri lebih jauh, akar dari semua masalah itu karena ketidakjelasan politik ketenagakerjaan nasional. Sekalipun dasar-dasar konstitusi UUD 45 khususnya pasal 27 dan pasal 34 telah memberikan amanat yang cukup jelas, bagaimana seharusnya negara memberikan perlindungan terhadap buruh atau pekerja. Dilihat dari peraturan pemerintah yang berlandaskan pada undang-undang dasar, masalah kontemporer ketenagakerjaan Indonesia saat ini berangkat dari 4 (empat) soal besar yaitu: 1. Tingginya jumlah pengangguran 2. Rendahnya pendidikan pekerja 3. Rendahnya perlindungan hukum, 4. Upah kurang layak.

Peraturan pemerintah mengenai pekerja tertuang dalam undang-undang dasar 1970 tentang keselamatan kerja, baik pekerja yang berada di darat, laut, udara ataupun dalam tempat lainnya. Undang-undang dasar lain yaitu, pada tahun 1948 yang diberlakukan pada undang-undang dasar 1951 nomor 3 tentang pengesahan pengawasan kerja menjadi tujuan dalam mengawasi apapun yang terjadi di lingkungan pekerja serta undang-undang dasar tahun 1948 pasal 1 berisi tentang pengaturan kerja laki-laki dan perempuan di dunia kerja, hingga sampai pada undang-undang nomor 3 tahun 1992 yang berisikan jaminan sosial tenaga kerja berupa, bentuk uang atau pelayanan yang kemungkinan terjadi kecelakaan atas pekerjaan yang dilakukan. Pada pasal ini tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan di dalam atau luar hubungan kerja.

Masalah mengenai kesejahteraan pekerja menjadi suatu kondisi krusial di Indonesia, Begitu pula halnya di Bukittinggi. Banyak terjadi penolakan dan tuntutan upah, harus dibayarkan pengusaha pada pekerja. Pergolakan mengenai

upah menjadi dasar munculnya ikatan pekerja. Ketentuan tentang serikat pekerja tercantum dalam undang-undang dasar nomor 21 tahun 2000 yang dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 yaitu: serikat pekerja bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

Undang-undang dasar nomor 13 tahun 2003 juga menggambarkan tentang pekerja dalam negeri mendapatkan hak. Kepentingan terhadap bayaran yang diterima juga terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang berguna untuk kemajuan produktifitas usaha. Dijelaskan pada pasal pertama nomor 30 dan 31 mengenai upah pekerja yaitu, nomor 30 mengenai pembayaran upah pekerja, dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan yang telah atau akan dilakukan pekerja serta nomor 31 pemenuhan kebutuhan pekerja secara langsung, adalah untuk mempertinggi produktifitas kerja yang aman dan sehat.

Upah ataupun bayaran minimum adalah dasar untuk mencapai kesejahteraan yang layak untuk pekerja, dengan memperhatikan aspek produktifitas dan kemajuan perusahaan. Selain itu, pertimbangan mendasar penetapan upah minimum adalah pada peraturan menteri tenaga kerja No.1 tahun 1999 mengenai kebutuhan hidup minimum, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan keberlangsungan usaha, tingkat upah yang berlaku, keadaan pasar tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan perkapita.

Penetapan upah minimum berperan disini adalah institusi dewan pengupahan yang merumuskan upah minimum oleh kepala daerah. Dewan pengupahan adalah suatu lembaga nonstruktural yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan pada kepala daerah, dalam menempatkan upah minimum

dan menerapkan sistem pengupahan serta menyiapkan bahan perumusan sistem pengupahan. Dewan ini terdiri atas tiga model berimbang yang melakukan perundingan tiap tahun untuk menetapkan upah minimum di setiap wilayah di Indonesia.

Upah minimum terletak pada dua kutub yaitu, *pro* (setuju) dan *kontra* (menolak). Antara dua kutub ini memiliki kepentingan berbeda, yaitu pemasukan bagi pekerja adalah pengeluaran bagi perusahaan. Pengusaha mengeluhkan ini karena tidak ada pengimbangan produktifitas pekerja. Sedangkan para pendukung berargumen upah minimum akan mendorong kesejahteraan pekerja. Kelompok kontra menilai pemberian upah minimum tidak akan menekan kemiskinan. Akan tetapi, hanya menguntungkan lebih banyak tenaga kerja terampil dan merugikan tenaga kerja tidak terampil, serta mengurangi daya saing perusahaan.

Berbanding lurus dengan pembahasan upah minimum pekerja di atas, pemberian upah untuk pekerja di Bukittinggi berada pada Rp 1.800.000,- /bulan yang diberlakukan di tahun 2016. Sementara tahun 2015, upah minimum pekerja berada pada Rp 1.600.000,- /bulan. Semua itu merupakan kondisi belum bisa dikatakan baik bagi kesejahteraan pekerja, terutama di Sumatera Barat. Hal ini berbanding lurus dengan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti: beras yang berada pada Rp 13.000,- /kg.

Asumsi penelitian ini adalah untuk bisa mengeluarkan pekerja, khususnya pekerja *belo* dari kekurangan ekonomi berada pada kisaran pendapatan Rp 3.000.000,- /bulan pada tahun 2016, dengan anggota keluarga empat orang dan termasuk pasangan suami istri. Semua itu belum mampu direalisasi kebijakan

kerja pemerintah. Pemahaman ini memperlihatkan bukti, bahwa bayaran rata-rata yang diterima pekerja *belo* di Kampung Sanjai Dalam kota Bukittinggi belum berada pada kategori memadai, rata-rata Rp 60.000,- /1x bekerja, dengan hari kerja rata-rata dua hari/minggu.

Jadi sangat jelas penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian mengenai petani di luar pedesaan Jawa, walaupun memiliki pendapatan yang juga tidak menentu bersamaan dengan pekerja *belo*. Penelitian mengenai moral ekonomi menjadi dasar bagi pekerja *belo* dalam bertahan hidup.

Pertimbangan memilih kajian moral ekonomi pekerja *belo* dalam upaya bertahan hidup adalah untuk membahas pekerja *belo*, bahwa mereka bertahan dalam pendapatan rendah dan berada pada pemenuhan kebutuhan hidup minimal. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis moral ekonomi pekerja *belo* dalam upaya bertahan hidup di Kampung Sanjai Dalam Kota Bukittinggi.

Berkaitan dengan penelitian tentang upaya bertahan hidup sudah diteliti baik dari kalangan mahasiswa, pemerintah, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan perguruan tinggi di berbagai kajian ilmu diberbagai daerah. Penelitian tersebut banyak membahas faktor penyebab pekerja bertahan pada suatu bidang pekerjaan tertentu, juga penanggulangan mengatasi kekurangan pendapatan. Fokus penelitian kali ini, mendeskripsikan bertahan hidup pekerja *belo* berdasarkan prinsip “keamanan hidup” dalam mencukupi pendapatan rumah tangga demi tetap hidup, dan memenuhi kebutuhan saat terbatasnya pendapatan, serta pertimbangan mereka memilih moral tersebut.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

1. Moral ekonomi seperti apa yang dianut bersama pekerja *belo* di Kampung Sanjai dalam bertahan hidup?
2. Bagaimana menjelaskan moral itu dengan melihat pekerja *belo* sebagai orang-orang yang menjamin kebutuhan anggota rumah tangganya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian yang dijelaskan terdahulu, maka terdapat dua hal yang menjadi tujuan dalam penelitian ini:

Tujuan Umum

Melihat latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengungkapkan moral ekonomi pekerja *belo* dalam upaya bertahan hidup.

Tujuan Khusus

1. Memahami suatu moral bersama dalam upaya pekerja *belo* bertahan hidup terhadap kekurangan pendapatan.
2. Menganalisis jaringan sosial pekerja *belo* dalam upaya bertahan hidup.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat atau Kegunaan hasil penelitian dapat diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan obyek penelitian. Manfaat praktis bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya,

untuk memberikan masukan dan memperbaiki kinerja, terutama bagi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat yang menjadi obyek penelitian.

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengaplikasikan teori sosiologi dalam menganalisis masalah keberlangsungan hidup pekerja *belo*, terutama di rumah tangga karena kekurangan ekonomi yang semakin tidak menentu di masyarakat.
- b. Sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya sosiologi.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan solusi keberlangsungan hidup pekerja *belo* di masyarakat.
- b. Sebagai masukan bagi pemerintah kota Bukittinggi dalam pengambilan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.

